Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Halmahera Utara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hakekatnya merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Segala kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam laporan ini diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tobelo, Februari 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

VICTOR O. MANGIMBULUDE, ST
NIP. 197210212002121005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, mengemban Tugas Pokok yaitu : ***"Melaksanakan Urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan"***.
Visinya adalah : "***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Profesional, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing"***.
dengan Misi :

1. ***Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Berbasis Teknologi yang Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.***
2. ***Meningkatkan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Aktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.***
3. ***Meningkatkan Kualitas SDM dengan Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat dan Profesionalisme Aparatur dalam Rangka Pelayanan Prima.***

Pencapaian RPJMD yang dilaksanakaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 terdiri dari 6 indikator yaitu produksi perikanan, Produksi Pengolahan Hasil Perikanan, Konsumsi Ikan, Cakupan Bina Kelompok (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar), Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Nilai Tukar Nelayan.

Dari totalitas capaian kinerja terhadap capaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan, 6 indikator sasaran, yang mencapai presentase <85% atau berada pada kategori **Berhasil** sebesar 100.328 % pada indikator sasaran Jumlah Produksi *Perikanan Tangkap* mencapai 97,35 % dan *Perikanan Budidaya* dikategori Berhasil mencapai 75,23 % , dan Indikator *Pengolahan dan Pemasaran* mencapai 1,140 ton% sedangkan kategori berhasil sebanyak 85 % terdapat pada indikator sasaran *Konsumsi Ikan* dengan kategori sangat berhasil sebanyak, 85% dan Indikator sasaran

Kelompok Nelayan meningkat pada kategori Berhasil mecapai 81,%. Sedangkan *Nilai Tukar Nelayan (NTN)* dikategori Berhasil dgn capaian 108,68 %

Untuk mendukung pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2024 dilaksanakan 5 program dan 15 kegiatan, dengan Pagu Anggaran APBD Perubahan sebesar Rp.5.803.880.498.-
dengan realisasi sebesar Rp. 3.456.262.769.- (52.20 %).

Untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik di masa datang maka diperlukan perencanaan yang idealnya dapat mengakomodasi semua kebutuhan pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat pengawas), anggaran yang lebih banyak, sumberdaya manusia yang kompeten dan *capable,* keterpaduan seluruh sektor serta dukungan dan koordinasi yang harmonis dari semua pihak guna terwujudnya visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
A. Maksud 1
B. Tujuan 2
C. Dasar Hukum dan Standar Penyusunan 2
1.3. Gambaran Organisasi 2
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.5. Pejabat dinas Kelautan dan Perikanan 4
1.6. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis 5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 7
2.1. Pernyataan Visi dan Misi 7
A. Pernyataan Visi 7
2.2. Rencana Kinerja/ Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 41
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 41
3.2. Analisis Capaian Kinerja 47
3.3. Akuntabilitas Keuangan 57
3.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 57
3.3.2 Belanja Administrasi Umum (BAU) serta Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) 58
3.3.3. Belanja Modal 59
BAB IV. PENUTUP 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN 63

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Daftar Pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 4
2. Lampiran Perjanjian Kinerja 10
3. Lampiran Perjanjian Kerja Kepala Dinas 12
4. Lampiran Perjanjian Kerja Esalon III 14
5. Lampiran Perjanjian Kerja Esalon IV 22
6. Tabel Realisasi NTN dan NTPi Tahun 2024 48
7. Realisasi Total Produksi Perikanan Tahun 2024 52
8. Jumlah Kelompok Binaan DKP 54
9. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 57
10. Persentase Pencapaian Target BAU dan BOP Tahun 2024 58
11. Aset dan Barang Tahun 2024 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KEADAAN UMUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan kepemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, demokrasi dan membuka partisipasi masyarakat yang luas. Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara ber kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tentang adanya keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik berkala, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan_Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga dengan maksud memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas

kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja (LKj) adalah agar Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

C. Dasar Hukum dan Standard Penyusunan

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini mengacu kepada :

- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara pasal 18, Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara memiliki Bagan Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada lampiran I. Adapun Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Bagian Sekretariat membawahi :
    1. Subag Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
    2. Subag Keuangan
    3. Subag Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan
    2. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan

d. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) membawahi :
   1. Seksi Bina Usaha
   2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
e. Bidang Perikanan Budidaya Membawahi :
   1. Seki Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
   2. Seksi Pengelolaaan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kesehatan Ikan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terlampir. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu 46 orang Pegawai (31 orang status PNS, 16 PTT diperbantukan pada UPT BBI Lokal Kusuri,12 PTT diperbantukan pada UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kusuri , dan Pantai Pulau Gumilamo dan 2 orang, dan tenaga kontrak di bagian sekretariat 2 orang, dilengkapi sarana dan prasarana berupa gedung kantor dan peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sebagai Tindak Lanjut Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara pasal 18 dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas Pokok dan Kewajiban menyelenggarakan tugas kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dan melaksanakan tugas dekonsentrasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat lintas sektor, lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.
2) Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan serta pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan serta pelayanaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan.
4) Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidaya ikan dengan pemberian Rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanandan Usaha penangkapan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6) Dalam melaksanakan kebijakan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dibantu oleh 1 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Yaitu: UPTD Budidaya Ikan Air Tawar yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Kusuri

1.5. PEJABAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada, dari semua jenjang jabatan terdiri dari eselon III, dan eselon IV dari semua jabatan yang telah terisi. Pada eselon III yaitu jabatan Sekretaris merangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas. Berikut nama-nama Pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara :

Tabel 1. Daftar Pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL.	JABATAN
1	Victor Mangimbulude ST 19721021 200212 1 005	Pembina	IV.b	Kepala Dinas
2	Asrrywelwin Wirano, S.Pd 197507252003121005	Pembina	IV.a	Sekretaris
3	Mike Sekewael, S.Pt 19760915 200604 2 028	Penata Tk.I	III.d	Kasubag Umum dan Kepegawaian

4	Effa Afrine Agustin Rattu, S.Pt 19741211 2010012 004	Penata Tk.I	III.d	Perencana Ahli Muda
5	Rexy Yasenta Taroreh ,S.IK 19820628 201101 2 004	Penata	III.d	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
6	Oktovianus M Mataputung. ST 19740507 200903 1 001	Pembina	III.d	Kabid Bina Usaha dan Pengelolaan TPI
7	Sariffudin, S.Pi, MP 19680302 200312 1 004	Pembina	IV.a	Pengawas Perikanan Ahli Madya
8	Mick Pattiasina, ST 19750320 200903 1 001	Penata	III.d	Penyuluh Perikanan Ahli Muda
9	Irwan Fikstor Djobubu 197302052008041005	Pembina	III d	Kabid Perikanan Budidaya
10	Junis Totoai Kojoba 19750601 201001 1 007	Penata	III.c	Pengolah Kesehatan Ikan Ahli Muda
12	Achmad H Nurlette, S.Pi 19721030 200312 1 004	Pembina	IV.a	Kabid Perikanan Tangkap
13	Leyhard S Talangamin S.St pi 19671009 199103 1 002	Penata	III.d	Pengolah Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muida
14	Yunsirgus Wirtha A.Md 19730625 200604 1 012	Penata Muda	III.c	Kepala UPTD BBI Kusuri

1.6 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan belum dapat dijalankan secara maksimal. Permasalahan utama dan isu-isu strategis yang dihadapi ialah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan serta minimnya pengetahuan dan ketrampilan dari pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
2. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perikanan;

3. Belum optimalnya usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas;
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 70% dari potensi lestarinya, potensi budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya ikan air laut dan budidaya perikanan darat (kolam, tambak dan danau) baru dimanfaatkan sekitar 2,72% dari potensi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan).
6. Minimnya kuantitas atau jumlah aparatur serta minimnya pengetahuan dan keterampilan aparatur yang mendukung tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Infrastruktur dan sarana prasarana belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya perikanan, pengolah dan pemasar produk hasil perikanan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan bahan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan target/kebijakan yang ditentukan untuk 5 tahun. Selain itu Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Analisa terhadap kinerja organisasi baik secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah pada umumnya, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Renstra 2021-2026 sesuai yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Visi Misi Bupati Tahun 2021-2026.

2.1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

A. PERNYATAAN VISI

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana telah diuraikan pada bab I, diperlukan suatu komitmen bersama untuk seluruh anggota Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dituangkan dalam suatu pernyataan Visi. Rumusan pernyataan Visi, Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

"MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI, UNGGUL DAN BERDAYA SAING"

Makna yang terkandung dalam Pernyataan Visi tersebut adalah adanya suatu komitmen bersama bagi seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, diperlukan peningkatkan kualitas dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan melayani para Nelayan, Pembudidaya

Ikan, Pengolah dan Pemasar serta Masyarakat Pesisir lainnya dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi pada Pelayanan Prima, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diharapkan terwujudnya Masyarakat baik itu Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan dan Pemasaran serta Masyarakat disekitarnya yang maju dalam teknis pengelolaan usaha, mandiri secara modal dan sejahtera dengan bertumpu pada Pemanfaatan Potensi-Potensi yang berasal dari sektor Kelautan dan Perikanan yang unggul dan setia menjaga kelestariannya serta menghasilkan produk-produk unggulan mutu yang berkualitas terbaik dan berdaya saing di manca Negara juga mampu menarik Investor Asing.

2.2. RENCANA KINERJA/PENETAPAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

2.2.1 Rencana Kinerja

Rencana kinerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada Tahun 2024. Rencana Kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawabkinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjejang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya

Melalui dokumen penetapan kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara program dengan sasaran. Adapun Sasaran Renstra, Target serta Program dan Kegiatan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

NO	SASARAN DI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024		KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
1	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	Peningkatan nilai SAKIP	A	Program Penunjang Urusan Daerah	Rp	3.839.507.555	APBD
2	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.168 ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	400.271.900	APBD
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	368,42 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	1.368.780.843	APBD
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian	Penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 %	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	19.998.900	APBD
		Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumber	100%				

	sumberdaya kelautan dan perikanan	Daya Kelautan dan Perikanan					
4	Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	Peningkatan produk olahan perikanan (ton)	1.100 ton dan AKI 64,24 %	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	298.840.900	APBD
5	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	Peningkatan PAD	200.000.000				APBD

Lampiran Perjanjian Kerja PK Kepala Dinas

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Tata Kelola Pimpinan, Kedinasan, Administrasi Persuratan dan Kearsipan	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran		Nilai SAKIP A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota	Rp 3.839.507.555,00	
2	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	Tangkap	24.168 ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 400.271.900,00	
			Budidaya	368,42 ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.368.780.843,00	
			UPTD BBI	200.000 ekor benih			

3	Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Penanganan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 19.998.900,00	
4	Investasi untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.	Meningkatnya produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	1.100 Ton AKI : 64,24	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 298.840.900,00	
5	Peningkatan PAD	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	Rp 200.000.000			
TOTAL					Rp 5.927.400.098	

Tobelo, 29 Januari 2024
Kepala Dinas

"Bupati Halmahera Utara"

Ir. Frans Manery

Victor O. Mangimbulude, ST
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210212002121005

Lampiran Perjanjian PK Esalon III

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Program**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Meningkatnya SDM dan Sarana Prasarana penunjang pelaksana tugas DKP	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%			
	1 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 219.645.900,00	
	2 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.235.731.544,00	
	3 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 27.174.500,00	

	4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 144.411.600,00	
	5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 136.297.809	
	6	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah secara berkala	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah secara berkala	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 76.246.202	
TOTAL						**Rp 3.839.507.555**	

Tobelo, 29 Januari 2024
Kepala Dinas

Sekretaris

Assryelwin Wirano, S.Pd
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197507252003121005

Victor O. Mangimbulude, ST
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210212002121005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	24.168 ton			
	1 Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun	100%	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 305.271.900	
	2 Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil di Daerah (Persen)	100%	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 95.000.000	

2	Cakupan Daerah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Presentase Keterlaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100%			
	1	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap di wilayah Sungan Danua, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan di lintas kabupaten / kota	16 Dokumen	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 9.999.000	
TOTAL						**Rp 410.270.900**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Achmad H. Nurlette, S.Pi
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210302003121004

Victor O. Mangimbulude, ST
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210212002121005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG BUDI DAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Tata Kelola Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	368,42 ton			
	1 Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan dalam Setahun	100%	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.999.800	
	2 Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Upaya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil di Daerah	100%	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp 71.200.000	
	3 Terkelolanya Usaha Pembudidaya Ikan	Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah dalam Setahun	100%	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Rp 1.292.581.043	

2	Cakupan Daerah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Presentase Keterlaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100%			
	1	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah Sungan Danua, waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan di lintas kabupaten / Kota	16 Dokumen	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Rp 9.999.900	
TOTAL						**Rp. 1.378.780.743**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Kepala Bidang

Irwan F. Djobubu, SP
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197302052008041001

Kepala Dinas

Victor O. Mangimbulude, ST
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210212002121005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN PENGELOLAAN TPI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Meningkatkan Jumlah Produk Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Ikan	1.100 ton			
	1 Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya (Dokumen)	100%	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp 14.999.900	
	2 Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengujian produk olahan hasil perikanan (Dok)	100%	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil	Rp 60.000.000	

	3	Tersedia dan Tersalurnya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah ikan yang tersalurkan sebagai bahan baku industri (Ton)	17.195 Ton	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 223.841.000	
TOTAL						**Rp. 298.840.900**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Oktovianus M. Mataputung, ST
Penata Tk. I / IIId
NIP. 197405072009031001

Victor O. Mangimbulude, ST
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210212002121005

Lampiran Perjanjian Kerja PK Esalon IV

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			
	1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 27.174.500,00	
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000,00	
	2 Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	5 Paket	Penyediaan Peralatan dan	Rp 9.999.800,00	

		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Perlengkapan Kantor		
	3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 14.999.900,00	
	4	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2.999.500,00	
	5	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 19.999.000,00	
	6	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 91.413.400,00	
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 19.999.100,00	
	2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rp 78.999.772,00	
	3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 2.500.000,00	
	4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 34.798.937,00	
4	Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah secara berkala		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah secara berkala	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 76.246.202	
TOTAL						**Rp. 384.130.111**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretaris

Mike Sekewael, S.Pt
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 197609152006042028

Assryelwin Wirano, S.Pd
Pembina Tk. 1 / Ivb
NIP. 19750725200312100 5

PERJANJIAN KINERJA PERENCANA - AHLI MUDA						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah	100%			
	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 109.999.900,00	
	2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.499.900,00	
	3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.499.900,00	

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	ordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 1.499.900,00	
	5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.499.900,00	
	6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.999.500,00	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 95.646.900,00	
TOTAL						**Rp 219.645.900**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Perencana - Ahli Muda

Sekretaris

Effa Afrine A. Rattu, S.Pt
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 197412112010012004

Assryelwin Wirano, S.Pd
Pembina Tk. 1 / Ivb
NIP. 197507252003121005

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH - AHLI MUDA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024							
No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	**100%**			
	1	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.231.731.844,00	
	2	Tersedianya Laporan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 999.900,00	
	3	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 1.499.900,00	

		Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		
	4	Tersedianya Pelaporan dan hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.499.900,00	
	5	Terlaksananya Pengelolaan Penerimaan PAD	Jumlah PAD Sektor Kelautan dan Perikanan	Rp. 200.000.000			
TOTAL						**Rp 3.235.731.544**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Analis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Muda

Sekretaris

Rexy Yasenta Taroreh, S.IK
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 198206282011012004

Assryelwin Wirano, S.Pd
Pembina Tk. 1 / Ivb
NIP. 197507252003121005

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP - AHLI MUDA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024							
No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	**Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil**		**Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil di Daerah (Persen)**	**100%**			
	1	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	700 Nelayan	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Rp 35.000.000	
	2	Tersedianya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitra Usahaan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitra Usahaan	20 Unit Usaha	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Rp 60.000.000	
TOTAL						**Rp 95.000.000**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap - Ahli Muda

Kepala Bidang

Leyhard S. Talangamin, S.St Pi
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 196710091991031012

Achmad H. Nurlette, S.Pi
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210302003121004

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024							
No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun	100%			
	1	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informsi Ikan di Perairan Darat	4 Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Rp 14.999.900	
	2	Terjaminnya Ketersediaan Saran Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangakap yang Terjamin dan Tersedia	184 Unit	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp 290.272.000	
TOTAL						**Rp 305.271.900**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan

O. J. Justiofera Paramata, A.Md
Penata Muda Tk. I / IIIb
NIP. 197607112009031002

Kepala Bidang

Achmad H. Nurlette, S.Pi
Pembina Tk. 1 / Ivb
NIP. 197210302003121004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BALAI BENIH IKAN LOKAL (BBIL) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terkelolanya Usaha Pembudidaya Ikan	Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah dalam Setahun	100%			
	1 Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	1 Unit	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Rp 895.791.843	
		Jumlah Produksi Benih Ikan dalam Setahun	200.000 Ekor Benih			
TOTAL					**Rp. 895.791.843**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Kepala BBIL

Kepala Dinas

Yunsirgus S. Wirtha
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 197306252006041012

Victor O. Mangimbulude, ST
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197210212002121005

PERJANJIAN KINERJA PENGELOLA KESEHATAN IKAN - AHLI MUDA							
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024							
No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	**Terkelolanya Usaha Pembudidaya Ikan**		**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah dalam Setahun**	**100%**			
	1	Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab./kota	Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kab./kota	4 Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp 14.999.800	
	2	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab./kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab./kota	70 Unit	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp 371.789.400	

	3	Terkelolanya kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kab./kota	Jumlah dokumen kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kab./kota	6 Dokumen	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp 10.000.000	
TOTAL						**Rp. 396.789.200**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Pengelola Kesehatan Ikan - Ahli Muda

Kepala Bidang

Junis T. Kojoba
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 197506012010011007

Irwan F. Djobubu, SP
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197302052008041001

PERJANJIAN KINERJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN						
TAHUN 2024						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan dalam Setahun	100%			
	1 Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab./ Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	20 Rekomendasi	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.999.800	

2	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		Persentase Upaya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil di Daerah	100%			
	1	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang Terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15 Kelompok	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	36.200.000	
	2	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan	6 Unit Usaha	Pembinaan Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 35.000.000	
TOTAL						**Rp. 76.199.800**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Penelaah Teknis Kebijakan

Kepala Bidang

Daud W. Ambeua, A.Md
Penata Muda Tk. 1 / IIIb
NIP. 198704202010011002

Irwan F. Djobubu, SP
Pembina Tk. 1 / IVb
NIP. 197302052008041001

PERJANJIAN KINERJA PENYULUH PERIKANAN - AHLI MUDA						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024						
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	100%			
	1 Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Resiko	6 Dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.999.900	
2	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengujian produk olahan hasil perikanan	100%			

	1	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinan Tentang Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Standar	8 Unit Usaha	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp 60.000.000	
TOTAL						**Rp. 74.999.900**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Penyuluh Perikanan - Ahli Muda

Kepala Bidang

Mick Pattiasina, ST
Penata Tk. I / IIId
NIP. 197503202009031001

Oktovianus M. Mataputung, ST
Penata Tk. I / IIId
NIP. 197405072009031001

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS PERIKANAN - AHLI MADYA							
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024							
No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Target**	**Sub Kegiatan**	**Anggaran**	**Keterangan**
(1)	**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	Tersedia dan Tersalurnya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan		Jumlah ikan yang tersalurkan sebagai bahan baku industri (Ton)	100%			
	1	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	17.195 Ton	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 223.841.000	
TOTAL						**Rp 223.841.000**	

Tobelo, 29 Januari 2024

Pengawas Perikanan - Ahli Madya

Kepala Bidang

Sariffudin
Pembina / IVa
NIP. 196803022003121004

Oktovianus M. Mataputung, ST
Penata Tk. I / IIId
NIP. 197405072009031001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DKP TAHUN 2024

Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitatif dan kuantitas yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran , tujuan, visi, misi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan reviue dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang terbaru, sasaran strategis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari, Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran, Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan ,pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat, bermutu dan berkwalitas, Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah.

Untuk mengetahui perencanaan kinerja dari masing-masing sasaran strategis tersebut maka disusunlah perencanaan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja program dengan kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan prima dalam tata kelola pimpinan, Kedinasan, administrasi persuratan dan kearsipan	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	A	Diambil berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Sekertariat
2	Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	Ton	jumlah capaian produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
			Ton	jumlah capaian produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
			Ekor	Jumlah capaian produksi benih (ekor)		
3	Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian	Kali	jumlah penanganan pelanggaran dalam 1 Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP
				Jumlah kelompok masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP

		sumberdaya kelautan dan		pengawas (POKMASWAS) yang terbentuk dalam 1 tahun		
4	Investasi untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.	Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	Ton	jumlah capaian produk olahan perikanan (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
			Kg/kapita/ Thn	Konsumsi IkanTingkat Konsumsi Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
5	Peningkatan PAD	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah		Jumlah capaian peningkatan PAD		

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran yang merupakan indikator kinerja utama. Prosentase Capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Capaian Kinerja Serta Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Sasaran Di Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun 2024		Realisasi Anggaran Tahun 2024	Ket.
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
1	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	Peningkatan Nilai SAKIP 2023	A		Program Penunjang Urusan Daerah	Rp. 3.839.507.555	Rp.3.249.701.094	Rp. 2,571,681,969	APBD
2	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul, dan berdaya saing dengan ketersediaan	% Peningkatan jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.168 ton	23.520 Ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.400.271.900	Rp 651.471.500	Rp.140.000.000	APBD
				83 %					
		% Peningkatan	368,42 ton	274 Ton	Program Pengemban	Rp. 1.368.780.843	Rp.1.007.416.543.	Rp.504,580,800	APBD

	sarpras perikanan	jumlah Produksi Perikanan budidaya		(80%)	gan Budidaya Perikanan				
3	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakatdalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan	penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	100	0	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	19.998.900	19.998.900	0	APBD
4	Meningkatnya produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	peningkatan produk olahan Perikanan (ton)	1.340 ton 65,40	1140 ton (82 %) AKI 85 Kg/kapita	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 587.464.900	Rp.384.959.00	Rp.240,000,000	APBD
5	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan	Peningkatan PAD	Rp. 200.000.000	Rp. 103.429.226		200.000.000	200.000.000	51.134.500	

	perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah								

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 2024 :

Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak (pertumbuhan Investasi PMTB) Perrtumbuhan PDRB Perikanan dan Kelautan.

Sasaran 1 :

Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran.

Pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini dikaitkan dengan pelayanan publik yang merupakan bagian tanggungjawab OPD, sehingga ukuran kinerja ini dapat dilihat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memonitor pencapaian program dan mengindentifikasi masalah yang penting dan dalam membantu pemerintah. Dalam Implementasi, SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. DKP, adalah instansi pemerintah yang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang fokus dan tepat sasaran. Ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kegiatan rutin yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan, baik Operasional maupun pelayanan ke masyarakat dalam hal pemberian dan pengurusan dan rekomendasi izin dan pelayanan masyarakat lainnya dalam bentuk informasi dan bantuan Sarana Prasarana Produksi telah dilaksanakan. Dan laporan semua kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk Dokumen SAKIP telah dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 DKP menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diharapkan meningkat. Peningkatan ini

menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.

Sasaran 2 :

Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan

"Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Unggulan Produk Kelautan dan Perikanan" tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut: Nilai tukar nelayan adalah adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). NTN digunakan untuk mengukur kemampuan/daya beli nelayan dan dapat menunjukkan daya tukar produk perikanan dengan barang dan jasa yang di konsumsi maupun untuk biaya produksi.

Semakin tinggi ***NTN (Nilai Tukar Nelayan),*** secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN ini menunjukan indikator dini kesejahteraan nelayan.

Tabel 8. Realisasi NTN dan NTPi Tahun 2024

Bulan	Indeks Harga yang diterima Nelayan	Indeks harga yang dibayarkan nelayan	NTN	NTPi
Januari	121.4	116.7	10,19	9,80
Februari	122.3	115.0	9,84	9,40
Naret	122.6	116.7	9,92	9,70
April	122.9	116.7	9,76	8,90
Mei	126.0	123.3	9,89	8,95
Juni	127.4	128.3	9,85	9,00
Juli	126.3	125.0	9,80	8,80
Agustus	123.7	120.0	9,89	8,95
September	123.9	116.3	9,90	8,90
Oktober	125.1	116.7	9,84	8,90
November	125.4	116.7	9,81	8,90
Desember	128.3	116.7	9,82	8,80
Rata-rata	149.53	142.81	109,32	109,00

Tabel 3.2.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator NTN Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1	Nilai Tukar Nelayan	108,78	109,32	106,68 %

Tabel 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Nelayan antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
1	Nilai Tukar Nelayan	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
		108,78	106,68 %	109,32	106,68%

Secara Umum berdasarkan standar kesejahteraan nelayan NTN yaitu di atas 100 , capaian indicator utama NTN Kabupaten Halmahera Utara mengalami penurunan sedikit *Penyebabnya, disebabkan indeks yang diterima nelayan tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan indeks yang harus dibayar keluarga nelayan* tapi di Halut NTN masih memenuhi kriteria tersebut yaitu dicapaian angka 106,68. Semakin tinggi NTN, mengindikasikan semakin kuatnya tingkat kemampuan/daya beli nelayan hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya di Kabuapaten Halmahera Utara

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pencapaian Nilai Tukar Nelayan dilaksanakan dengan intervensi program perikanan tangkap dengan kegiatan-kegiatan berupa : ➢ Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan 1.5 GT ➢ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Penangkapan Ikan ➢ Pelatihan Penggunaan alat Perikanan Tangkap.

Sasaran 3 :

Kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.

Melalui Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan sumber daya laut di Kabupaten Halmahera Utara adalah dengan pemanfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan Teknik Penangkapan Ikan, dengan eksplorasi, eksploitasi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan konservasi dengan pemanfaatan kekayaan LAut, menjaga laut dari ancaman luar dan dalam dengan Terjaganya melalui operasi dan pengawasan melalui patroli laut yang melibatkan Polisi Khusus (POLSUS) Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Polisi Air (POLAIR) Kepolisian Halmahera Utara untuk Mencegah Ilegal Fishing dan Destructive Fishing.

Pemanfaatan secara optimal yang diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan seimbang dengan daya dukungnya, dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Sasaran 4

Investasi untuk meningkatkan taraf hidup

Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pada tahun 2024, dantaranya melalui program Asuransi nelayan, Pembuatan Sertifikat HAk Tanah atas Nelayan yang bekerja sama dengan Pihak Pertanahan , Kelompok kelautan dan perikanan yang mengalami peningkatan kelas yang telah mendapatkan pembinaan berupa pelatihan bidang kelautan, dan perikanan, dan partisipasi dalam pembuatan kelompok nelayan meningkat, pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dan pembudidaya melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi kelompok, verifikasi kebutuhan dan performa kelompok, serta memfasilitasi dengan pemberian bantuan sarana, sehingga

harapannya kelompok usaha kelautan dan perikanan tersebut dapat memperkuat kapasitas baik kemampuan personil maupun kelembagaannya. Kelembagaan agar nelayan punya akses serta daya tawar lebih kuat dengan Mengeluarkan Surat Tanda Daftar Nelayan (STDN), Tanda Daftar Pembudidaya (STDPi), dan berbagai fasilitas pendanaan, juga pelatihan dan diversivikasi usaha, memberikan bantuan berupa alat tangkap kepada nelayan, sehingga membantu mensejahterahkan nelayan. Dengan memiliki potensi wilayah Kelautan dan Perikanan yang sangat strategis, maka investasi di bidang perikanan sebagai salah satu komoditas terbesar di Kabupaten Halmahera Utara terus diperbarui demi memberikan kemudahan kepada setiap pelaku usaha / investor untuk mengakses data potensi investasi yang diperlukan dalam proses kegiatan penanaman modal, sehingga meningkatkan iklim investasi untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Bagi para Calon Investor, bisa mengakses informasi yang telah disediakan di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sudah Beberapa Investor yang telah melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan fungsinya sebagai Perusahaan yang bekerjasama mengelolah beberapa Fasilitas Pengolahan Perikanan yang telah memberi manfaaat bagi para nelayan dalam peningkatan kesejahteraan melalui ketersediaan tenaga Kerja, tersedianya pasar yang sangat menunjang dengan harga ikan yang tinggi sesuai standar, dan penggunaan tekhnologi pengolahan dan penangkapan ikan yang sangat efektif membantu dalam peningkatan produksi serta berperan dalam penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontrak kerjasama dalam penggunaan Asset Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dari semua indikator kinerja diatas yang menjadi prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan capaian .. Pernyataan ini dapat terlihat pada tabel diatas Capaian Kinerja (tabel 3.1.2)

1.Indikator Produksi Perikanan

Tabel 9. Realisasi Total Produksi Perikanan Tahun 2021 – 2024

Tahun	Total Realisasi (Ton)	Produksi Tangkap (Ton)	Produksi Budidaya (Ton)
2021	20.959,8	20. 659	300,8
2022	25.415,52	25.082	332,52
2023	23.820	23,452	368,42
2024	23.794	23,520	274

Adapun produksi perikanan terbagi atas produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, di tambah 3 indikator penunjang lainnya sebagai berikut:

1.Produksi Perikanan Tangkap:
Produksi Perikanan Tangkap tahun 2024 sebesar 23.520 ton, sedangkan target produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 24.168 ton, maka persentase produksi perikanan tangkap tahun 2024 adalah : (23.520 /24.168 ton) x 100% = 83.07 % Dari hasil tersebut maka produksi perikanan tangkap tahun 2023 mengalami penurunan dari target RPJMD.

2.Produksi Perikanan Budidaya
Dari hasil produksi perikanan budidaya tahun 2024 mengalami penurunan dari target RPJMD sebesar 364,42 ton , dengan capaian yang ***274*** ton, dari target produksi.
Dari hasil capaian produksi diatas menunjukkan bahawa hasil capaian produksi budiadaya Tahun 2024 mengalami penurunan dengan persentase produksi perikanan budidaya adalah : (364,42 ton / 274 ton) x 100% = 80,21 %.

3.Pengolahan dan Pemasaran:
Target Pengolahan pada tahun 2024 di 1.100 ton dengan capaian 1.140 ton, dengan capaian 82% mengalami penurunan disebabkan salah satunya penyebab adalah minimnya infrastruktur perikanan termasuk sarana prasarana pengolahan yang masih bersifat tradisional, dan beralih ke

pengolahan daging ikan lainnya, dan juga distribusi hasil perikanan dan transportasi pasar perikanan dan perusahan yang mengolah olahan Ikan mengalami kendala dalam hal permodalan dan proses produksi .

4.Konsumsi Ikan:
Angka Konsumsi Ikan untuk tahun 2024 merupakan hasil survei konsumsi rumah tangga
Target Konsumsi Ikan tahun 2024 sebesar 64,24 Kg/Kapita/Thn, sedangkan target Konsumsi Ikan yang dicapai sebesar 64,35 Kg/kapita, maka persentase Konsumsi Ikan tahun 2024 adalah: 64,35 kg/kapita / 64,24 Kg/Kapita/ x 100% = 84.66 % .
Dibandingkan dengan target di RPJMD pada tahun 2024 maka tingkat Konsumsi Ikan mengalami sdikit kenaikan dari target RPJMD, hal ini dikarenakan tingkat konsumsi ikan harian rumah tangga banyak beralih dengan mengkonsumsi ikan dengan daging hewan ternak lainnya seperti daging ayam, sapi, babi dll.
Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pencapaian Angka Konsumsi Ikan dengan intervensi program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan dengan kegaiatan berupa : ➢ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan ➢ Sosialisasi Pengembangan Pengelolaan dan Konsumsi Gemar Makan Ikan Melalui Lomba Masak Serba Ikan ➢ Penyediaan Produk Perikanan bagi Masyarakat (pasar ikan murah menjelang hari raya).

5.Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya Pengolah dan Pemasar
Dalam Pencapaian Produksi Perikanan dengan Indikator Cakupan Bina Kelompok yang telah ditetapkan tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Koordinasi terhadap pembentukan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) serta Kelompk Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pada program prioritas, dan banyak nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara perorangan, sehingga pendapatannya sangat fluktuatif dan cenderung rendah, keterbatasan sarana prasarana nelayan dan berkurangnya keterlibatan pihak Dinas

Kelautan dan Perikanan Kab Halut dalam pemberian pendampingan, bimbingan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam pembentukan Kelompok Sehingga tidak ada penambahan kelompok baik kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pokhlasar dan Pokmaswas.
Pada tabel di bawah , jumlah kelompok nelayan yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera utara sampai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Kub	Pokdakan	Poklahsar	Pokmaswas	Total
2021	446	118	209	4	779
2022	606	241	255	13	1115
2023	608	341	278	13	1209
2024	608	341	278	13	1209

Penyebab Menurunnya Produksi Perikanan Tahun 2024 :

- *Perikanan Tangkap*, menurunnya hasil tangkapan ikan dikarenakan oleh iklim yang berubah-ubah dengan adanya tekanan berupa indikasi penurunan kualitas perairan dengan musim atau cuaca yang tidak mendukung, jumlah bantuan sarpras hanya terbatas, kondisi pasar yang sepi pembeli khususnya pembeli diluar Halut dan akses pasar yang yang gagal dalam mencapai target, aktivitas penangkapan lebih ketika suatu jenis ikan diambil lebih cepat dibanding pembiakan stok speies, untuk menghasilkan penggantinya (over fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (destruktiv fishing), serta masih kurangnya sarana penangkapan ikan (API) yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas terbatas.

- *Produksi Budidaya Perikanan*, ini mengalami kendala dengan meningkatnya harga pakan sehingga kurangnya pakan dalam produksi ikan, kurangnya modal usaha serta masih kurangnya pemahaman secara teknis dalam pengembangan usaha Budidaya Air Tawar dan Payau, beralih profesinya pembudidaya yang sudah tidak aktif lagi, dan tenggelamnya KJA di Lingkar danau yang mengakibatkan banyak ikan yang mati akibat banjir, serta berkurangnya bantuan benih/pakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan demikan halnya dengan

- *Produksi Benih di Balai Benih Ikan Kusuri*, di Tahun 2024 tidak ada produksi dikarenakan tidak ada lagi anggaran pembelian pakan dan pengadaan induk ikan yang sudah mati. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya anggaran operasional Balai Benih Ikan Kusuri.
- *Produksi pengolahan*, mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya dari target 1.100 ton menjadi 1.140 ton yang walaupun masih memiliki beberapa masalah yang dihadapi oleh unit-unit pengolahan ikan yaitu keterbatasan modal usaha untuk pengadaan sarana dan prasarana/ peralatan pengolahan serta pengadaan bahan baku pengolahan.

Solusi dan Permasalahan

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dalam mendukung pencapaian Volume Produksi dan Solusi dari permasalahan di atas adalah:

1. Dilaksanakannya peningkatan produksi dengan pengembangan sarpras di bidang perikanan tangkap dan budidaya,
2. Pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur dan pembudidaya laut dan darat,
3. Penambahan modal usaha serta pangsa pasar yang menunjang produksi perikanan,
4. Pengolahan Hasil Perikanan dengan intervensi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan kegiatan berupa : pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan produk perikanan, sosialisasi untuk penerbitan SKP, pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengolahan, sosialisasi pengembangan pengelolaan dan konsumsi gemar makan ikan melalui lomba masak serba ikan, serta penyediaan produk perikanan bagi masyarakat dengan solusi menyediakan unit – unit pengolahan hasil perikanan bagi kelompok pengolah yang lebih memadai dan ketersediaan stok ikan dari Nelayan Penangkap Ikan Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berperan dalam Investasi untuk meningkatkan taraf hidup untuk kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana, meningkatkan kompetensi SDM Kelautan Dan Perikanan melalui pembinaan dan pendampingan dengan menyediakan anggaran yang

dialokasikan untuk program dan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan untuk Aparatur dan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Masyarakat. Pengawas yang mendapat Pembinaan, Pendidikan dan Latihan serta Sarpras yang menunjang.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indikator kinerja produksi perikanan adalah:

1.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan:

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Operasional UPTD Perbenihan Ikan Air Laut
- Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya UPTD)

2.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil

3.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Sosialisasi Gemar Ikan dan Lomba Cipta Menu Perikanan

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pendapatan yang diperiolah Daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Indikator Pendapatan Asli Daerah sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dengan realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 51.134.500,- atau turun sebesar 49,44, % persen dari yang target ditetapkan dalam DPA TA 2024 sebesar 200.000.000,-. Adapun rincian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN
1.	BBI Air Lokal Kusuri (Penjualan Benih Ikan Nila) dan Nila Konsumsi 93.000 ekor x Rp. 250,-	Rp.0
	Retsribusi Usaha Perikanan	4.109.000
	Retsribusi Usaha Perikanan	50.500
	Retsribusi Usaha Perikanan	3.000.000
	Retsribusi Usaha Perikanan	1.050.000
	Retsribusi Usaha Perikanan	3.110.500
	Retsribusi Usaha Perikanan	9.073.000
	Retsribusi Usaha Perikanan	74.000
	Retsribusi Usaha Perikanan	62.000
	Retsribusi Usaha Perikanan	20.000.000
JUMLAH		**Rp. 51.134.500**

3.3.2. Belanja Administrasi Umum (BAU) serta Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 pada APBD setelah Perubahan mengalami penurunan dari pagu sebelumnya yaitu sebesar Rp. 5.803.880.498 menjadi Rp 5.310.240.337,00 dengan belanja operasi Rp.5.291.724.437,00 yang terdiri dari belanja Belanja barang dan Jasa Dana Alokasi Umum DAU Rp 2.643.764.615.. dan Belanja Pegawai Rp. 2.647.959.822.-
sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 12. Persentase Pencapaian Target BAU dan BOP Tahun 2024

No	Anggaran Belanja Rutin Tahun 2024	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Belanja Pegawai (Gaji/Tunjangan)	2.647.959.822	2.385.594.969	262.363.853	67,07
2	Belanja Barang dan Jasa (DAU)	2.643.764.615	1.070.667.800	1.573.096.815	75,28
4	Belanja Modal	18.515.900	0	18.515.900	100
	Jumlah	5.310.240.337	3.456.262.769	1.853.977.566	82,85

3.3.3. Belanja Modal

Anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yang di alokasikan melalui belanja ModaL ada sampai akhir tahun anggaran 2024

Adapun Asset dan Modal sampai Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 13. Asset dan Barang Tahun 2024

NO. URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	01	01	**TANAH**	1		
2	02		**PERALATAN DAN MESIN**			
		02	a. Alat-alat Besar	-		
		03	b. Alat-alat Angkutan	-		
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-		
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-		
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	20		
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	2		
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	-	-	

		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-	
		11	h. Komputer laptop	24		
3	03		**GEDUNG DAN BANGUNAN**			
		11	a. Rehab Bangunan Indoor BBI	1	395.401.980	
		12	b. Bangunan Monumen	-	-	
4	04		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**			
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	-	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-	
		15	c. Instalasi	-	-	
		16	d. Jaringan	-	-	
5	05		**ASET TETAP LAINNYA**			
		17	a. Buku Perpustakaan	-	-	
		18	b.Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	
		19	c.Hewan Ternak dan Tumbuhan			
6	06	00	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	-	-	
Total				**43**		

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 5.310.240.337,- (lima miliyard tiga ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.291.724.437,00,- (lima miliyard dua ratus Sembilan puluh satu tujuh ratuis dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.18.515.900.000,- (delapan belas juta lima ratis sebelas ribu Sembilan ratus rupiah). Realisasi anggaran sampai akhir tahun sebesar Rp.3.456.262.709,00 (tiga miliyard empat ratus limapuluh enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah). Secara umum capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2024 berkategori baik yang terdiri dari 4 indikator sasaran strategis dan 15 indikator kinerja utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut : ▪ Capaian kinerja sasaran strategis rata-rata sebesar 74,66 %

Berdasarkan hasil analisa pada bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 menetapkan 4 indikator sasaran berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2027 berada pada kategori **BERHASIL**, yang diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja dengan matriks sbb:

Evaluasi Pencapaian Sasaran

No.	Capaian Kinerja Indikator RPJMD (%)	Predikat	Jumlah Indikator RPJMD
1.	> 85	Sangat Berhasil	1
2.	***70 - < 85***	***Berhasil***	***4***
3.	55 - < 70	Cukup Berhasil	0
4.	< 55	Kurang Berhasil	0
Jumlah			4

Dengan paparan diatas maka jelas tergambar kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara tahun 2024, maka diharapkan untuk lebih meningkatkan etos kerja setiap aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Good Governance sehingga visi Pemerintah Halmahera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan pada khususnya dapat terwujud.

Demikian laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :